

# Menghadapi Singapura di Masa Depan<sup>1</sup>

Oleh: Darma Agung S. I

*The purpose of this paper is to give a general description of Indonesia-Singapore problems. As we know, these two neighbour countries had a fluctuation over their relations, and this paper offer a simple analyze through an International Relations theories (a Realism Theoris) and a security perspective about why the Singapore made any contradictive decision and how the Indonesia should act and decide against them.*

Keywords: Realism, Comprehensive Security.

## **Latar Belakang**

Sejak krisis yang dialami Indonesia pada akhir dasawarsa 90an, Singapura yang merupakan negara tetangga Indonesia, sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan bagi Indonesia. Luas wilayah Singapura yang kecil dan perekonomiannya yang maju di lain sisi berakibat pada sikap tidak toleran pada negara-negara tetangganya, dimana pemerintah Singapura merasa bahwa negaranya membutuhkan keamanan yang *extra*. Posisi Indonesia di mata dunia internasional yang lemah, berbagai permasalahan dalam negeri pasca krisis moneter 1997 yang muncul, dengan sendirinya menjadikan Singapura memiliki bargaining position yang kuat.

Untuk menjelaskan perilaku Singapura, penulis menggunakan pendekatan **Realisme** yang lebih menggambarkan dilema negara kecil yang dikelilingi oleh negara-negara besar, penekanan balance of power dan peningkatan kemampuan militer sebuah negara. Sedangkan untuk menjelaskan sikap Indonesia ke depan, penulis menggunakan pendekatan **Comprehensive Security**. Pendekatan ini memandang bahwa tiap aspek merupakan potensial ancaman bagi negara, dan menitikberatkan pengamanan bergantung pada sifat dan bentuk ancaman. Lingkup keamanan bukan saja domain aspek militer (meskipun masih dominan) namun juga dalam segala aspek. Keamanan tidak saja melihat ancaman tertuju pada teritorial dan otoritas sebuah negara namun juga keamanan manusia.

## **Gambaran Umum Singapura**

Singapura terletak di penghujung Semenanjung Malaysia, berdekatan dengan Negeri

---

<sup>1</sup> Telah dipresentasikan di depan staf Balitbang Dephan RI pada 10 Agustus 2006, dan diedit ulang sesuai naskah aslinya untuk didiskusikan di Laboratorium Pertahanan Keamanan "Defensia" UPN "Veteran" Yogyakarta pada 3 Oktober 2006.

Johor Darul Takzim (Malaysia) dan Kepulauan Riau (Indonesia), dengan luas wilayah 692,7 km<sup>2</sup>.

Singapura merupakan negara bekas jajahan Inggris sejak 1819 dan menjadi bagian dari Negeri-Negeri Selat (Straits Settlements) bersama pulau Pinang dan Malaka. Singapura memperoleh kemerdekaannya pada 9 Agustus 1965, dan semakin berkembang menjadi pusat perekonomian di kawasan Asia Tenggara bahkan menjadi salah satu macan Asia. Singapura pernah mencatat sebagai negara terkaya keempat (1997) di dunia setelah Swiss, Jepang, dan Norwegia. Hingga saat ini, Singapura masih menjadi salah satu negara makmur di kawasan Asia. Kemajuan Singapura ini ditandai dengan anggaran pendidikan yang sangat tinggi, program perumahan yang berhasil, tingkat korupsi dan kriminalitas yang sangat rendah karena penerapan hukum yang tinggi.

Upaya untuk mencari keselamatan (survival), ketertataan (order), dan kemakmuran adalah tema dominan dari politik Singapura. Sejak masih dalam jajahan Inggris, tema-tema tersebut sudah menjadi perhatian dalam kebijakan pemerintah, dan hal itu berlanjut ketika memutuskan untuk bergabung dengan Malaysia pada tahun 1963. Ancaman terhadap keselamatan Singapura masih terus berlanjut, yaitu ketika menghadapi dampak konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Untuk menghadapi lingkungan regional yang tidak bersahabat (dikelilingi oleh negara besar dengan mayoritas penduduknya beragama Islam), Singapura membangun kebijakan ekonomi yang cepat yang didasarkan atas lingkungan domestik yang didesain kondusif, dan berjangkauan luas untuk menjamin kedaulatannya. Sejak tahun 1969, Singapura mampu mengkonsolidasikan kemerdekaan, stabilitas, dan kelangsungan hidupnya hingga sekarang. Keberhasilan ini tidak lepas dari keberhasilan ekonomi dan penanaman nilai masyarakat Singapura yang terdidik dan berkualitas (Singapore Meritocracy).

Dengan keterbatasan yang dihadapi oleh Singapura, baik dari SDA, luas wilayah, dan posisi geopolitiknya yang tidak menguntungkan karena menjadi lokasi strategis dunia sekaligus ajang perebutan pengaruh, pemerintah Singapura menyusun kebijakan Politik Luar Negerinya (PLN) dengan tujuan:

1. **National security:** Letak yang terjepit serta luas wilayah yang sempit merupakan faktor yang dominan yang tidak menguntungkan bagi pertahanan dan keamanannya. Oleh karena itu, Singapura selalu was-was terhadap Indonesia maupun Malaysia dimana hubungan kedua negara tersebut dengan Singapura pernah tidak harmonis. Untuk

---

<sup>2</sup> Agus Suryana, PROFIL NEGARA: Negara Macan Asia, NAFTA&Uni Eropa, hal 49.

mengantisipasi, Singapura mengembangkan: gagasan pertahanan pakta Asia Tenggara yang menekankan syarat negara-negara Asia Tenggara tidak akan mengubah tapal batas dengan kekerasan dan negara-negara besar menjamin keamanan Asia Tenggara, menawarkan pangkalan militer bagi AS, meningkatkan kualitas militernya, mendukung ZOPFAN, dan tetap bergabung dengan British Commonwealth.

2. **National building:** Integrasi nasional merupakan masalah tersendiri yang dihadapi Singapura karena penduduknya yang multi-etnis. Singapura menekankan pada Malaysia dan Indonesia bahwa meskipun Cina merupakan etnis mayoritas tetapi Singapura bukanlah negara Cina ketiga.
3. **Economic Survival:** Dengan keterbatasan SDA, Singapura mengandalkan kebutuhan ekonominya dari negara lain bahkan hal yang vital sekalipun seperti supply air dari Malaysia. Singapura memanfaatkan letaknya yang strategis sebagai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia dengan membuka pelabuhan bebas dunia dan enterport. Selain itu, Singapura memanfaatkan pembangunan industri manufaktur sebagai tiang perekonomiannya yang kedua, yang bersifat orientasi ekspor, padat karya dan padat modal.

Singapura sangat bergantung pada pasar dunia dan investasi asing untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Untuk itu, Singapura perlu membentuk situasi yang kondusif bagi kelancaran arus investasi ke dalam kawasan terutama negaranya dengan membentuk keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara dan kerjasama regional.

Meskipun Singapura menyatakan bahwa PLN-nya netral namun kecenderungan untuk berkiblat kepada Barat (AS dan sekutu) sangat kuat. Singapura juga menggunakan ASEAN sebagai instrumen politik luar negerinya di kawasan regional untuk meminimalisir ancaman maupun kerjasama dalam meningkatkan pembangunan nasionalnya. Karakter lain dari PLN Singapura adalah: Pragmatisme, anti-Komunis dan pro-Barat, perimbangan kekuatan di Asia Tenggara, Regionalisme, komitmen pada perdagangan bebas, penanganan ketergantungan eksternal, pembentukan identitas nasional Singapura, dan menunjukkan otonomi Singapura dalam peta politik internasional.

### **Hubungan Luar Negeri Indonesia-Singapura**

Selama ini hubungan RI-Singapura cukup baik dengan terjalannya kerjasama regional (ASEAN, NAFTA, ARF, ASF, AMF, ASEAN+3), kerjasama multilateral (PBB, GNB, APEC, WTO,

G77), dan kerjasama bilateral. Pada masa Orde Baru hubungan kedua negara bersifat saling membutuhkan yang ditandai dengan banyaknya pembangunan proyek bersama dan besarnya investasi Singapura ke Indonesia. Dalam bidang ekonomi, RI dan Singapura telah membentuk kerjasama segitiga ekonomi: SIJOURI (Singapura-Johor-Riau). Dalam bidang pertahanan-keamanan, kerjasama meliputi pengamanan bersama selat Malaka, latihan militer bersama secara berkala dimana Singapura telah membangun Air Combat Manuvering Range yang dibangun di Pekanbaru untuk dimanfaatkan bersama, pelatihan personel militer RI ke Singapura, dan lain-lain.

Perkembangan pasca krisis moneter 1997 terlihat sikap inkonsistensi dan arogansi sepihak Singapura yang dapat mengancam stabilitas regional maupun hubungan baik kedua negara, seperti pada permasalahan perjanjian ekstradisi dan pembangunan kekuatan militer Singapura secara besar-besaran.

## **Permasalahan**

### **1. Hukum**

Indonesia dan Singapura mengalami permasalahan dalam hal kesepakatan tentang ekstradisi. Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan angka korupsi tinggi di dunia mengembangkan kerjasama dengan beberapa negara untuk memberantas korupsi, salah satunya melalui perjanjian ekstradisi yaitu permintaan pelaku kejahatan pidana tertentu untuk diadili dan ditindak di negara yang memintanya. Hal ini dilakukan karena selama ini pelaku korupsi di Indonesia banyak yang lari dan kemudian bermukim di Singapura. Sayangnya selama ini, Singapura terkesan menghindar dan tidak kooperatif dengan Indonesia, bahkan upaya yang telah diluncurkan sejak 1974 tidak mengalami perkembangan berarti hingga tahun 2005 dimana perundingan tersebut untuk pertama kalinya dilakukan dan hingga tahun 2006 telah mencapai 7 kali perundingan. Hingga saat ini perjanjian ekstradisi telah menyepakati 16 dari 19 pasal rancangan perjanjian yang dibicarakan, dan kemungkinan untuk disepakati semuanya masih akan memakan waktu cukup lama.

Seperti kita ketahui, Indonesia dan Singapura menggunakan sistem hukum yang berbeda, Indonesia mengacu pada sistem Eropa Kontinental sedangkan Singapura menggunakan sistem Anglo-Saxon. Perbedaan dasar sistem hukum yang dimiliki antara Indonesia-Singapura sangat menghambat dalam proses perundingan.

Namun, hal ini seharusnya menjadi tidak masalah kalau melihat Indonesia juga melakukan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong dan Australia yang juga menggunakan sistem hukum Anglo-Saxon. Dalam kerjasama mengenai perjanjian ekstradisi tersebut, Indonesia-Singapura juga merundingkan secara paralel mengenai perjanjian kerjasama pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) dan kontra-terorisme. Kerjasama pertahanan meliputi MTA (military training area) dan penggunaan radar untuk Flight Affirmation Regional (FAR)<sup>3</sup>.

Selain itu ada sinyalemen bahwa Singapura ingin menjadi Swiss di Asia. Singapura menyadari bahwa negaranya yang kecil tidak memiliki sumber daya alam yang potensial sehingga melakukan berbagai kebijakan yang dilakukan termasuk melakukan proteksi terhadap aset orang-orang bermasalah adalah untuk menambah devisa negara. Singapura sangat tergantung pada aktivitas perdagangan sehingga dituntut untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi para investor dan juga para nasabah, dan perjanjian ekstradisi akan mengancam stabilitas perekonomian Singapura.

Sebagai negara pelabuhan, Singapura juga menjadi tempat persinggahan barang-barang ilegal, namun kemudian barang tersebut dilegalkan hanya dengan bermodal dokumen pelunasan pajak Singapura, masalah barang itu layak atau tidak bukanlah kewenangan Singapura. Salah satu bukti dari sinyalemen tersebut adalah Singapura tidak pernah mengumumkan data yang transparan tentang transaksi dagangnya dengan Indonesia padahal neraca perdagangan Singapura mengalami surplus<sup>4</sup>.

Pengumuman itu baru dilaksanakan pada tahun lalu (2005) –setelah 3 dekade tidak diumumkan– karena merupakan tuntutan dunia dan setaraf dengan laporan perdagangan Singapura ke semua mitra dagangnya, dan akan kontinyu.

## **2. Pertahanan Keamanan**

Saat ini, Singapura memiliki kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. Kebijakan militer Singapura pada 2006 ini adalah untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan Singapura, melakukan deterens terhadap kegagalan diplomasi, untuk mengamankan kemenangan yang cepat dan menentukan terhadap penyerang.

<sup>3</sup> Gusti Nur Cahya Aryani, Perjanjian Ekstradisi, Tarik Ulur Kepentingan Indonesia-Singapura, [www.hariansib.com](http://www.hariansib.com), 14 Juli 2006.

<sup>4</sup> Wicaksana, I.G Wahyu, "Pemberantasan Korupsi dan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura", [www.freelist.org/archives](http://www.freelist.org/archives)

Untuk mencapai tujuan tersebut, Singapura menempuh kebijakan: memperkuat militer, SDM dan teknologi AB Sing; mengembangkan hubungan baik dengan negara-negara di kawasan dan sekitarnya melalui dialog yang efektif, CBM, dan kerjasama.

Kebijakan militer Singapura ke depan:

1. Terciptanya lingkungan yang aman dan terkendali dimana integritas teritorial dan kedaulatan Singapura terjaga dan terjamin.
2. Akses yang aman dan terkendali menuju jalur komunikasi udara dan laut Singapura.
3. Membangun hubungan kerjasama dalam bidang pertahanan di kawasan dan sekitarnya.
4. Melakukan komitmen dengan pasukan cadangan Nasional yang didedikasikan bagi Sistem Total Defense.
5. Membangun AB Singapura yang siap secara operasional dengan perlengkapan memadai yang mampu dihadapkan pada ancaman yang bersifat luas terhadap keamanan Singapura.
6. Menciptakan AB Singapura yang berkemampuan tinggi, profesional dan berkembang secara teknologi.

Sebagai sebuah negara kecil, Singapura memiliki kekuatan militer yang besar di kawasan Asia Pasifik dengan anggaran militer terbesar dan juga angkatan bersenjata yang profesional dan modern. Total anggaran militer Singapura tahun 2006 diproyeksikan mencapai 10,05 miliar US dolar, mengalami peningkatan 787,06 juta US dolar atau 8,5% dari anggaran militer tahun 2005. Dari anggaran tersebut, \$9,69 miliar (96,5%) digunakan untuk biaya operasional dan sisanya \$355 juta (3,5%) digunakan untuk biaya pembangunan. Sebanyak \$9.64 miliar (99,4%) dari anggaran operasional dialokasikan kepada AB untuk pembayaran perlengkapan militer, mempertahankan perlengkapan dan kamp, membayar gaji dan pembayaran kepada pasukan cadangan nasional.

Sebagai sebuah negara kecil, Singapura memiliki kekuatan militer yang besar di kawasan Asia Pasifik. Singapura memiliki strategi pertahanan menyerupai Israel yang mengandalkan kekuatan pasukan cadangan (reservist) dan persenjataan teknologi tinggi. Skadron AU Singapura (RSAF) tersebar di beberapa tempat di luar negeri; Skadron Helikopter (Brunei, Queensland, dan Texas), Skadron A-4 di Perancis, Skadron F-16 C/D di Arizona dan New Mexico, Sekolah Penerbang di Australia Barat,

Detasemen Tanker Udara KC-135 di Kansas. Secara rutin dan berkala skadron tersebut melakukan latihan di Australia, Pekanbaru, Thailand, dan Brunei.

Singapura memiliki kedekatan hubungan militer dengan AS meskipun bukan dalam bentuk ikatan pakta pertahanan, tetapi Singapura selalu menjadi pendukung kehadiran AS di Asia Tenggara. Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan AS, Singapura selalu terlibat aktif didalamnya seperti menawarkan pangkalan militer pengganti Subic dan Clark dan kemudian menjadi pusat dukungan logistik bagi Armada Ketujuh AL AS, menginginkan keterlibatan AS dalam pengamanan selat Malaka, dan penanganan terorisme di Asia Tenggara.

Industri persenjataannya selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga diekspor bagi negara-negara Dunia Ketiga, hal ini untuk mendukung total defense capability negara. Singapura memiliki Singapore Technologies Pte LTD yang merupakan holding company untuk semua industri senjata dan korporasi yang terkait, dan terbagi atas 5 area bisnis strategis (SBA) seperti engineering, technology, infrastructure and lifestyle, property, dan financial services.

Singapura mematok sekitar 6% dari GDPnya untuk keperluan militer tiap tahunnya. Angka itu melebihi jumlah yang dianggarkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand- 1,5% GDP, Malaysia- 2,1%, dan Indonesia- 1,7% GDP. Anggaran yang mencapai miliaran dolar AS tersebut digunakan untuk pembelian perangkat perang (tank modern, pesawat tempur, serta kapal perang).<sup>5</sup>

Besarnya anggaran militer dan juga kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara dibandingkan luas wilayahnya yang kecil, terlihat sangat paradoks dimana kerja sama regional ASEAN cukup komprehensif dan sistem pemerintahannya yang demokratis dan menjunjung asas-asas *civilian*. Rober Karniol, editor Jane's Defense Weekly – sebuah jurnal pertahanan top dunia– mengungkapkan bahwa, “...kekuatan militer Singapura sangat tidak proporsional dan justru dianggap menjadi ancaman di Asia Tenggara”<sup>6</sup>.

Hal ini sesuai dengan perspektif Realisme, dimana negara akan membangun kekuatan militernya untuk menjaga survival dan kepentingan nasionalnya, dengan mempertimbangkan aspek kekuatan militer negara-negara besar di kawasan yang dianggap tidak cukup mampu untuk mengamankan negaranya. Dari sudut pandang

<sup>5</sup> www.Republika.co.id, 10 Januari 2003, Israel di Asia Tenggara (2)-Dua negara haus teknologi militer.

<sup>6</sup> www.waspada.co.id

pertahanan keamanan, memang ada kriteria-kriteria yang menegaskan batasan dimana sebuah negara membangun kekuatannya untuk tujuan ofensif/defensif (meskipun kedua hal ini masih kabur), yaitu: batasan domestik dimana keputusan harus disahkan oleh legislatif, hubungan antar negara dengan mempertimbangkan sensitifitas dari negara lain, dan batasan hukum internasional. Namun demikian perlu juga untuk melihat relevansi pembangunan kekuatan militer tersebut dengan mengacu pada aspek ancaman dan postur pertahanan yang dimiliki.

Saat ini Indonesia-Singapura telah menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan cukup baik melalui berbagai latihan militer bersama, pengamanan Selat Malaka, maupun MTA. Namun kerjasama dalam bidang MTA ini akan dikaji kembali karena Singapura selalu bermasalah dengan melanggar wilayah yang ditetapkan dan juga keinginannya untuk melibatkan negara lain, selain itu masih ada hal-hal yang belum disepakati seperti lama kerjasama, pelibatan pihak ketiga seperti Amerika Serikat dan Australia, dan pengakuan hak tradisi Singapura di Laut Cina Selatan oleh Indonesia. Kerjasama ini dituangkan dalam Keppres 8/1996 tentang pemberian izin pemerintah Indonesia kepada Singapura untuk berlatih di sebagian wilayah Indonesia yang dikenal dengan MTA. Meskipun Singapura melalui Chief of RSAF-nya telah menyatakan tidak akan memperluas MTA ke wilayah Kalimantan, namun pemerintah tetap menghentikan MTA pada tahun 2003 karena berbagai hal yang belum disepakati mengenai MTA sendiri, seperti perjanjian ekstradisi dan masalah perbatasan Indonesia dan Singapura.

### **3. Reklamasi Pulau Jurong dan Masalah Perbatasan**

Indonesia dan Singapura memiliki permasalahan terkait dengan reklamasi pulau Jurong. Reklamasi pulau Jurong selain menimbulkan masalah perbatasan antara Indonesia dan Singapura, mengancam lingkungan sekitar (abrasi terhadap pulau Nipah), juga akan mengancam perekonomian pulau Batam. Ancaman terhadap perekonomian pulau Batam didasarkan atas asumsi bahwa dengan semakin luasnya pulau Jurong maka akan terjadi relokasi industri ke pulau Jurong. Investor lebih cenderung untuk menanamkan sahamnya disana karena profesionalitas dan modernitas Singapura, stabilitas politik domestik Singapura yang menciptakan rasa aman bagi tumbuh berkembangnya perekonomian Singapura.

Singapura hingga saat ini telah melakukan reklamasi pulau Jurong sehingga menambah luas wilayah perbatasan Singapura secara signifikan. Reklamasi yang telah dilakukan sejak tahun 1976 dilakukan dengan membeli (mencuri) pasir laut dari pulau Karimun (Indonesia), dan pemerintah Indonesia baru mengambil keputusan akhir pemberhentian ekspor pasir laut pada 2003 melalui SK Menperindag tanggal 28 Februari 2003 setelah sebelumnya juga pernah dihentikan namun dibuka kembali pada tahun 2002.

Singapura pada tahun 1991 tercatat luas daratannya 633 km<sup>2</sup>, dan pada 2001 tercatat menjadi 760 km<sup>2</sup>, hal ini akan akan mengganggu kesepakatan tentang perbatasan karena sesuai dengan konvensi hukum laut, maka luas Singapura yang sekarang dapat mencapai Provinsi Kepulauan Riau saat ini. Selain itu, masalah penambangan pasir ilegal untuk mereklamasi pulau Jurong, Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar. Tercatat resmi volume ekspor pasir legal Riau yaitu 0,93 meter<sup>3</sup>/hari, sedangkan volume impor pasir Singapura dari Riau mencapai 2,02 juta meter<sup>3</sup>/hari dengan nilai mencapai Rp 11,33 miliar. Berarti terdapat selisih sebesar 1,10 juta meter<sup>3</sup>/hari dengan jumlah mencapai Rp 6,14 miliar/hari atau Rp 2,24 triliun/tahun.<sup>7</sup>

Pihak-pihak terkait saat ini telah menyatakan tidak akan melakukan ekspor pasir laut untuk tujuan reklamasi sebelum dicapainya kesepakatan wilayah perbatasan, dan juga harga jual pasir tiap metriknya. Permasalahan ini sangat kompleks mengingat penambahan luas wilayah Singapura, terancamnya pulau Nipah sebagai batas terluar Indonesia, tekanan yang dilakukan pengusaha Singapura terhadap pengusaha Indonesia, dan pemerintah Indonesia yang tidak kompeten dalam menanggapi permasalahan-permasalahan serupa yang ditandai dengan inkonsistensi, kurangnya koordinasi dan kurang melihat perkembangan di masa depan.

Pada tahun 2004, wilayah pulau Jurong telah mengalami perluasan hingga 3,5 km ke arah barat daya, dimana wilayah perairan tersebut belum ada perjanjian batas laut antara Indonesia dan Singapura. Pada tahun 2005, reklamasi pulau Jurong telah mencapai 6 km dari titik terluar pada tahun 2004<sup>8</sup>. Selama ini Singapura telah mereklamasi delapan pulau kecil yaitu: pulau Seraya, Merbabu, Merlimau, Ayer

---

<sup>7</sup> [www.waspada.co.id/opini](http://www.waspada.co.id/opini)

<sup>8</sup> [www.gatra.com](http://www.gatra.com), 18 Juli 2005, "Reklamasi Pulau Jurong Bertambah Enam Kilometer".

Chawan, Sakra, Pesek, Masemut Laut, dan pulau Meskol sehingga menjadi pulau Jurong.

Pulau Nipah sendiri memiliki banyak posisi strategis selain keberadaannya sebagai titik pangkal penentuan batas wilayah Indonesia-Singapura.

**Posisi strategis pertama**, adalah kemungkinan wilayah ini mengandung endapan mineral ekonomis, seperti timah, emas, dan bauksit. Indikasi itu dapat dilihat dari sejarah geologi Selat Malaka yang sebelum zaman es mencair berupa daratan, bagian dari Paparan Sunda. Apabila bisa dibuktikan pada dasar Selat Malaka terdapat jejak sungai purba, tidak tertutup kemungkinan mineral ekonomis tersebut diendapkan di sana sehingga maraknya isu penambangan pasir di wilayah ini sebenarnya adalah pencari mineral yang setelah diekstraksi di atas kapal membuang lumpur dan lempungnya ke laut. Hal itulah yang menambah kekeruhan laut di sekitar Pulau Nipah sangat tinggi.

**Posisi strategis kedua**, menjadikan Pulau Nipah sebagai pusat monitoring polusi lingkungan laut sekitar Selat Malaka dan Philip. Sebagian besar kapal yang melintasi selat-selat ini adalah tanker yang memuat ribuan galon minyak tanah, solar, dan sebagainya, yang sangat riskan terjadi bencana pencemaran tumpahan minyak ataupun masuknya material polutan lainnya ke wilayah Indonesia (dumping).

Terhadap kasus ini, Indonesia bisa mengajukan klaim internasional atas kerusakan ekosistem dan lingkungan laut yang terjadi dalam teritorial kita. Namun, banyak klaim Indonesia terhadap masalah ini mentah pada aspek pembuktian ilmiah dan lemahnya bukti hukum yang mendukung proses klaim tersebut.

Sementara itu, Konvensi Hukum Laut Internasional yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1982, UNCLOS mengatur dengan jelas kedaulatan penuh Indonesia atas wilayahnya terhadap upaya pencegahan, pengurangan, dan kontrol terhadap semua kemungkinan polusi lingkungan laut.

**Posisi strategis ketiga**, menjadikan Pulau Nipah sebagai salah satu pulau untuk monitoring bajak laut di sekitar Selat Malaka dan Philip, yang saat ini telah menjadi perhatian dunia internasional akibat maraknya aksi perompakan di sana.

Pulau Nipah yang terancam tenggelam karena abrasi akibat reklamasi pulau Jurong telah mengalami reklamasi sejak tahun 2002 dengan kontraktor Hutama Karya. Pulau ini memiliki luas 1,4 hektare pada saat air pasang, dan 60 hektare pada

saat air surut. Tidak hanya pulau Nipah saja yang terancam tenggelam tetapi banyak pulau tenggelam karena pasirnya disedot Tongkang ke Singapura.

#### **4. Pengamanan Selat Malaka**

Selat Malaka memiliki nilai ekonomis dan strategis karena selat ini merupakan salah satu jalur pelayaran penting di dunia dan merupakan salah satu dari sembilan selat dan terusan strategis di dunia. Selat yang membentang sekitar 800 km ini termasuk diantara sembilan selat dan terusan strategis seperti Selat Babel Mandeb, Selat Bosphorus, Selat Dardanella, Selat Dover, Selat Hormus, Selat Gibraltar, Terusan Suez dan Terusan Panama.

Nilai vital selat Malaka dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu: kebutuhan sumber daya hayati, kepentingan Amerika Serikat secara ekonomi dan strategis, keamanan dari piracy dan terorisme, ketidakmampuan militer Indonesia dan kompleksitas pengamanannya.

Sejak jaman kerajaan-kerajaan selat Malaka juga merupakan akses utama yang menghubungkan dua pusat kebudayaan dunia saat itu, Cina dan India. Wajar bila banyak pihak yang menginginkan penguasaan wilayah perairan tersebut baik bagi kepentingan ekonomi ataupun kepentingan strategis lainnya. Situs Wikipedia menyebutkan bahwa jalur selat Malaka tiap tahunnya dilalui oleh 50 ribu kapal yang mengangkut antara 1/5-1/4 perdagangan laut dunia. Setengah dari minyak dunia diangkut melalui selat ini dengan jumlah sekitar 11 juta barel minyak perhari. Malaka juga memenuhi kebutuhan sumber daya laut negara sekitar melalui 380.000 ton lebih ikan (lebih dari 60% total tangkapan ikan tiap tahunnya). Bagi Indonesia, selat Malaka merupakan salah satu penghasil tangkapan ikan terbesar, dan menjadi strategis karena perairannya merupakan pertemuan antara laut Jawa, Samudera Indonesia, Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan.

Selat Malaka memiliki panjang sekitar 800 km dan lebar sekitar 1,5 mil (sekitar 2,7 km) pada titik tersempit di selat Phillips, yang juga merupakan salah satu dari kemacetan lalu lintas terpenting di dunia dan menjadi jalur pelayaran dari Samudera Hindia ke Samudera Pasifik. Selat ini merupakan jalur utama dalam pengiriman komoditi dari negara-negara Eropa dan Timur-Tengah ke negara-negara Asia Timur.

Banyaknya aktifitas pelayaran di selat ini, menjadikannya sebagai selat terpadat di kawasan Asia Pasifik dengan rata-rata 200 kapal tiap hari dimana 72%-nya adalah kapal tanker yang mengangkut pasokan bahan energi melintasi dari Samudera Hindia ke Samudera Pasifik, utamanya ke Jepang, Cina dan Korsel.

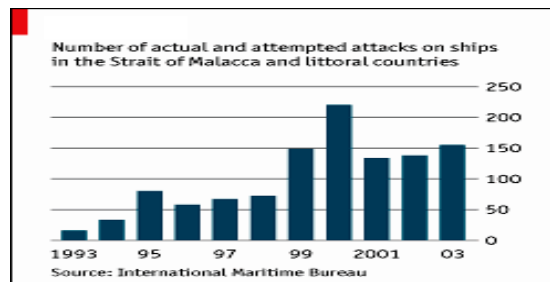
Keinginan Singapura dengan melibatkan AS juga dapat dipahami dengan adanya kepentingan AS di Asia Tenggara. Kepentingan AS dalam pengamanan selat Malaka dapat dipahami sebagai sebuah kepentingan geopolitik di kawasan Asia. Amerika Serikat diperkirakan sudah lama mengincar selat Malaka (khususnya) dan Asia Tenggara (umumnya)<sup>9</sup>. Saat inipun ada banyak kepentingan disana. Dari sisi **ekonomi**, kepentingan ekonomi Jepang dan Cina menjadi alasan utama. Jepang dan Cina yang menggunakan jalur selat Malaka untuk mengangkut impor bahan bakar mereka harus dijamin keamanannya karena perekonomian dua negara tersebut menjadi sumber guna menutup defisit neraca perdagangan Amerika yang mencapai US\$600 M. Dari sisi **keamanan strategis**, Amerika Serikat rupanya ingin mencari pengganti dari pangkalan militer mereka di Clark dan Subic (Filipina) sejak mereka meninggalkannya pada tahun 1992. Amerika Serikat kesulitan mencari pangkalan pengganti karena sikap negara-negara Asia Tenggara yang pada umumnya sangat anti pada intervensi asing, meskipun Amerika Serikat sudah memiliki pangkalan AU di Singapura yang kecil. Jalur selat Malaka yang juga menjadi jalur pelayaran internasional juga sering dilalui oleh Armada Ketujuh AS yang beroperasi di wilayah Samudera Pasifik dan Hindia, sehingga AS juga berupaya untuk mencari pangkalan yang tepat bagi armada tersebut. Timor Leste dan Singapura sempat dikabarkan menjadi tujuan.

Dengan kondisi geografis dan lalu-lintas selat ini pula yang menjadikannya sebagai sasaran pembajakan (piracy) dan juga terorisme (terrorisme). Ancaman ini akan sangat mengganggu akses pelayaran dan perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembajakan di selat ini sudah berlangsung cukup lama dan kemudian menghangat akhir-akhir ini karena intensitas aktivitas pembajakan yang meningkat dan isu pengamanan pihak asing (Amerika Serikat) seiring dengan isu terorisme yang bergulir di skala global. Peningkatan cukup signifikan tercatat dimana pada tahun 1994 terdapat 25 serangan sedangkan pada tahun 2000 terdapat 220

---

<sup>9</sup> Majalah Angkasa no. 11, Agustus 2004 tahun XIV, hal.56

serangan, kemudian terjadi penurunan sekitar 150 serangan lebih pada tahun 2003. Frekuensi serangan meningkat kembali pada paruh awal 2004, dan angka total dipastikan akan melebihi rekor tahun 2000. Sebagai tanggapan dari krisis ini, angkatan laut Indonesia, Malaysia dan Singapura meningkatkan frekuensi patroli di kawasan tersebut pada Juli 2004. Namun pada tahun 2004, tercatat telah terjadi piracy sebanyak 190 kali (40% skala global), dan pada kuartal pertama tahun 2005 telah terjadi empat kali piracy, hasil yang tidak cukup menggembirakan.



Ketakutan akan muncul terorisme adalah dari kemungkinan sebuah kapal besar dibajak dan ditenggelamkan pada titik terdangkal di Selat Malaka (kedalamannya hanya 25m pada suatu titik) sehingga dengan efisien menghalang lajur pelayaran. Apabila aksi ini berhasil dilancarkan maka efek yang parah akan timbul pada dunia perdagangan, karena jalur pelayaran tertutup dan dengan begitu akses perdagangan terhenti untuk sementara dan kapal-kapal akan melakukan rute memutar yang jarak tempuhnya cukup jauh dan meningkatkan bea transportasi. Bila hal tersebut menjadi kenyataan maka kemungkinan yang terjadi adalah naiknya harga produk yang dibawa melalui selat Malaka terutama barang-barang mentah dan migas yang menjadi bahan dasar industri, naiknya bea transportasi berarti juga naiknya bea produksi dan juga harga produk dipasaran lokal, nasional, regional dan juga global dan akan menjadi suatu permasalahan ekonomi nantinya. Selain itu, terorisme maritim ini juga pernah terjadi di Yaman dengan peledakan kapal perang AS, USS Cole pada tahun 2000, dan juga *oil tanker* milik Perancis, the *Limburg*, pada tahun 2002. Pada tahun yang sama di Maroko, pemerintah setempat mendapati sekelompok teroris yang berencana akan melakukan teror pada kapal Inggris dan kapal Amerika di Selat Gibraltar. Abu Sayyaf di Filipina juga pernah meledakkan kapal ferry di Teluk Manila pada tahun 2004. Hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi ketakutan tersendiri bagi Singapura, AS, dan negara-negara Asia Timur yang supply bahan bakar produksinya berasal dari kawasan Timur Tengah. Bantarto Bandoro dalam artikelnya yang berjudul "Selat

Malaka: Fakta, Pergulatan Kekuatan Dan Fear Factor”, menuliskan bahwa kekhawatiran di Selat Malaka juga lebih pada kemungkinan penggunaan kapal besar untuk menjalankan aksi terorisme seperti Tragedi 911.

Negara-negara yang menjadi tujuan perdagangan dan pelayaran juga menjadikan selat ini begitu vital. Tiga negara besar yang berada di sekitarnya yaitu Cina, India dan Indonesia, ditambah lagi satu negara super ekonomi, Jepang jelas menginginkan keamanan dan kelancaran dari jalur yang mereka tempuh. Cina, India dan Indonesia adalah tiga negara besar dengan jumlah penduduk yang terbesar di dunia dan menjadikannya negara kunci dalam hubungan perdagangan yang merupakan pasar di Asia. Sedangkan Jepang adalah negara industri maju yang minim sumber daya alam dan energi sehingga mengharuskannya melakukan impor dimana jalur pengirimannya melalui selat Malaka dan mengandalkan keamanan wilayah perairan ini. Tingginya angka kebutuhan Jepang, Cina dan Korea Selatan akan impor minyak mereka mengakibatkan mereka sangat bergantung pada stabilitas selat Malaka. Keamanan Asia Timur (Cina) juga sangat bergantung pada stabilnya supply minyak untuk mencegah ekspansi Cina dalam mencari sumber daya minyak alternatif pasca perang Teluk tahun 1990 dan juga stabilitas selat Malaka.



Selat Malaka menjadi isu geopolitik dan geostrategis karena adanya keinginan pengamanan jalur tersebut oleh Amerika Serikat terkait isu perompakan dan terorisme yang marak di kawasan ini, padahal selat ini berbatasan secara langsung dengan tiga

negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura, sehingga secara tidak langsung menjadikan ketiga negara ini yang bertanggung jawab terhadap keamanan wilayah ini. Negara-negara besar seperti AS dan Cina menaruh perhatian besar dalam mengendalikan keamanan selat Malaka karena keterkaitan antara 3 faktor yaitu: ekonomi, militer dan minyak, yang dapat memunculkan efek yang dinamis bagi stabilitas Asia Tenggara.

Kontroversi ini semakin diperparah dengan sikap setujunya Singapura dengan kehadiran Amerika Serikat sedangkan Indonesia dan Malaysia menganggap hal ini merupakan masalah yang bisa diselesaikan dalam level regional tanpa kehadiran pihak asing. Dalam konsensus yang dicapai negara-negara pantai pada Juni tahun 2005, disepakati tiga prinsip kerjasama maritim, yaitu: Tanggung jawab keamanan selat Malaka terletak pada negara-negara pantai; Negara pengguna dan masyarakat internasional termasuk badan internasional dapat memainkan peranan dan kontribusi kepada keamanan selat Malaka; Setiap langkah-langkah kooperatif yang dilakukan negara lain harus didasarkan pada hukum internasional dan menghormati kedaulatan negara-negara pantai.

Meskipun isu ini sudah *cooling-down* karena berbagai usaha pengamanan oleh 3 negara sudah dilakukan melalui joint-patrol (The Malacca Straits Sea Patrols) sebagai aksi konkret terhadap permasalahan perairan Malaka, namun tetap saja hal ini diwaspadai oleh Malaysia dan Indonesia jika isu ini kembali naik dan mengalami *internasionalisasi* dan *sekuritisasi*, karena sampai saat ini usaha-usaha tersebut belum menampakkan hasil yang riil. Malaysia dan Indonesia bahkan mengangkat isu Piracy sebagai isu non-konvensional utama.

Keamanan dan pengelolaan di Selat Malaka adalah sebuah masalah yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek dan dimensi serta implikasi yang berbeda. Indonesia secara internasional sangat diharapkan dapat mengamankan selat Malaka dan sekitarnya termasuk perairan laut Cina Selatan (dari kepulauan Natuna). Persaingan kawasan Asia terhadap kepentingan selat Malaka harus diperhatikan karena banyak aktor yang ingin berperan disana. Selain itu, salah satu kompleksitas masalah tersebut adalah persoalan ganda Terorisme dan Piracy. Kompleksitas lainnya meliputi masalah keamanan lingkungan dan isu-isu sosial ekonomi.

Keterkaitan antara isu terorisme dan piracy ini muncul ketika AS menyatakan

keinginannya untuk ikut serta dalam pengamanan selat Malaka. AS menghubungkan kedua isu terpisah ini menjadi satu bagian dari rencana dunianya. Piracy dan Terorisme merupakan isu yang berbeda, karena Piracy lebih pada aspek ekonomi sedangkan Terorisme lebih pada aspek politis. Tidak seharusnya mencampuradukkan dua isu ini. Namun, terlepas dari pro-kontra keterkaitan kedua isu ini, Indonesia harus mewaspadaikan keinginan negara-negara tertentu untuk intervensi di selat Malaka dan juga keinginan Singapura yang cukup kuat untuk menghadirkan AS karena ketakutannya atas kapabilitasnya yang dianggap masih minim dan rawan terhadap konflik dengan negara-negara tetangganya.

## **5. Lain-lain**

### **5.1. Ekonomi**

Pembelian aset Indosat oleh salah satu perusahaan di Singapura ternyata menyimpan permasalahan tersendiri bagi pemerintah Indonesia karena ruang lingkup Indosat di bidang telekomunikasi yang sangat vital bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia.

Tabloid Intelejen pernah menuliskan dilematisnya penjualan Indosat karena Indosat memiliki satelit tersendiri yang secara bersama-sama digunakan oleh militer Indonesia dan dikhawatirkan membocorkan rahasia negara ke Singapura -hal ini sempat dibantah oleh pihak TNI sendiri- apalagi hubungan Indonesia-Singapura akhir-akhir ini hangat karena berbagai kebijakan pemerintahnya yang dianggap mengabaikan stabilitas dan sentimen regional.

Selain itu, selama 3 dekade sebelumnya, Singapura tidak pernah mengeluarkan data perdagangannya dengan Indonesia, dan hal ini menghambat dalam pelacakan perdagangan gelap. Meskipun saat ini hal tersebut (laporan perdagangan dengan Indonesia) telah diumumkan, pemerintah Indonesia harus menjaga kontinuitas aktivitas ini untuk memudahkan penanganan berbagai kasus perdagangan gelap ataupun juga pelarian dana Indonesia ke Singapura.

### **5.2. Lingkungan Hidup**

Singapura pernah melakukan ekspor limbah berbahaya ke Indonesia pada tahun 2004 ke pulau Galang dan pernah akan melakukan ke pulau Nipah. Ekspor

limbah yang dikategorikan beracun dan berbahaya ini masuk ke Pulau Galang pada 29 Juli 2004 berjumlah 1762 kantung (1149,4 ton). Singapura menolak untuk melakukan reeksport dengan alasan limbah tersebut hanyalah pupuk biasa.

Ekspor limbah ini bukan pertama kalinya bagi Singapura karena sebelumnya Singapura juga melakukan hal yang sama ke pulau Bangka (pada saat masih menjadi bagian dari Prop. Sumsel). Singapura juga pernah akan melakukan ekspor ke pulau Karimun, pulau Nipah dan juga pulau Batam.

### **5.3. Tenaga Kerja Indonesia**

Permasalahan TKI hampir terjadi di tiap negara tujuan. Kebutuhan lapangan pekerjaan dan nafkah yang layak tidak diimbangi dengan pengetahuan dan wawasan yang seimbang bagi para tenaga kerjanya.

Di Singapura juga terjadi hal yang sama terkait kasus TKI. Banyak TKI yang mengalami penganiayaan, pemerkosaan, melakukan kejahatan kriminal dan lain sebagainya. Kurang tanggapnya dan kurangnya koordinasi departemen terkait dengan agen tenaga kerja akan selalu menciptakan masalah-masalah baru jika tidak ditangani dengan cepat.

### **Indonesia dalam menghadapi Singapura**

Setelah mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi antara Indonesia dan Singapura, Saya mencoba untuk menjelaskan "perilaku" Singapura sesuai dengan teori yang ada dan juga bagaimana Indonesia menghadapi Singapura ke depan.

Sebagai kekuatan ekonomi-militer yang dominan di Asia Tenggara, Singapura tampaknya ingin memainkan peranan sebagai "super power tunggal", tentunya dengan dukungan penuh Israel dan Barat. Dalam teori politik hegemonik, sang hegemon akan biasanya selalu berusaha keras mencegah munculnya rival atau kekuatan lain di kawasan itu. Itu artinya secara teoritis, Singapura akan mencegah, agar Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lain untuk muncul sebagai kekuatan yang signifikan. Karena itu, bisa dipahami, mengapa Singapura sangat aktif membeli saham berbagai perusahaan strategis seperti milik Indonesia yaitu, Indosat dan Telkom, dan juga melakukan pembangunan kekuatan militer secara besar-besaran.

Keinginannya untuk menghadirkan Amerika Serikat di Asia Tenggara kembali dan menawarkan pangkalan militer pengganti di Filipina, memicu sentimen negara-negara sekitarnya.

Hal ini tidak lebih dari ketakutan Singapura dan juga bagian dari ambisinya untuk menjadi kekuatan sentral di Asia Tenggara, seperti yang dituliskan dalam *Haaretzdaily.com* yang menjelaskan keterlibatan Israel dalam pembangunan pertahanan Singapura untuk menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di Asia sejak bulan Desember 1965.

Atas landasan menciptakan kehidupan bertetangga yang baik dan rukun adalah kewajaran dan normatif bagi tiap negara karena tidak ada satupun negara yang mampu hidup tanpa bantuan negara lain sehingga Indonesia tetap harus mengembangkan kerjasama dengan negara manapun termasuk Singapura. Namun, meski saat ini Indonesia-Singapura telah melakukan berbagai kerjasama bilateral, regional dan multilateral di berbagai bidang, permasalahan-permasalahan yang ada harus dilihat secara obyektif, komprehensif dan futuristik. Dalam menjaga hubungan baik dan mencegah friksi yang berkelanjutan, Indonesia yang saat ini lemah hampir dalam semua sektor harus melakukan kerjasama berkelanjutan dengan melihat kepentingan nasional dan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan perspektif Realisme (Kerjasama internasional sulit dicapai, meski bisa dilakukan terutama ketika negara ingin memperoleh keuntungan lebih/absolute benefit). Di tingkat regional, prioritas kerjasama negara-negara ASEAN untuk menciptakan Confidence Building Measures dan posisi tawar Indonesia dalam bidang diplomasi, forum kerjasama keamanan ARF, dan Collective Security yang menuju tahapan Cooperative Security. Kerjasama lainnya dapat dilakukan melalui forum dialog Pasifik Barat Daya yaitu kerjasama negara-negara sub kawasan Pasifik Barat Daya. Dalam kerjasama regional, ASEAN juga memiliki kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengutamakan tanpa kekerasan/militer yaitu Treaty of Amity and Cooperation.

Di lain sisi, selama proses tersebut, Indonesia harus tetap melakukan segala upaya untuk meningkatkan kapabilitas dalam segala bidang (ekonomi, pertahanan dan keamanan, politik, dan sosial). Melakukan profesionalisme militer, kerjasama militer baik dalam industri, pakta pertahanan maupun pengembangan kekuatan militer dan non-militer, dan lain sebagainya.

Banyak kesepakatan kerjasama antar negara yang dibangun tersebut seringkali menjadikan Indonesia “canggung” untuk menjadi bangsa dan negara yang besar yang memainkan peran utama di kawasan, karena dikhawatirkan menjadi negara yang ekspansionis. Tanpa mengesampingkan kesepakatan tersebut, saya kira Indonesia harus menjadi kekuatan sentral di kawasan Asia Tenggara, menciptakan balance of power terhadap negara-negara sekitarnya seperti Singapura dan Australia, dan menjadi kekuatan hegemoni atau setidaknya menciptakan sistem bigemoni regional.

Dengan kekuatan militer yang kuat, setidaknya Indonesia mempunyai kekuatan deterens yang besar dan memiliki bargaining position yang cukup kuat karena kekuatan diplomasi harus diimbangi dengan kekuatan militer sebagai “backing”, sehingga keamanan nasional secara tradisional (dan akan berefek pada non-tradisional) akan kuat. Dengan keamanan nasional yang kuat akan menjamin keselamatan bangsa dan rakyatnya dan juga menjamin keberlangsungan pembangunan.

Pada pembangunan domestik, pemerintah dalam menghadapi Singapura harus menselaraskan pembangunan nasional dengan melihat kepentingan nasional dan juga aspek geopolitik bahwa negara ini negara kepulauan. Hubungan Luar Negeri pun harus didasarkan pada aspek geopolitik<sup>10</sup>. Permasalahan yang muncul sejak terbukanya gelombang demokratisasi harus disikapi dengan kedewasaan dan kebijaksanaan tanpa harus kehilangan arah tujuan pembangunan. Reformasi yang masih berjalan setengah hati tidak akan bisa mengoptimalkan pembangunan Indonesia.

Di lain sisi pembangunan nasional dan politik domestik diarahkan pada:

1. Perubahan paradigma pemerintah pusat dalam memutuskan kebijakan hubungan luar negeri (terutama Singapura). Dari yang bersifat kooperatif dengan alasan perdamaian maka perlu dirubah kooperatif untuk mencapai keuntungan absolut sesuai kepentingan nasional.
2. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah supaya tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih, dan mengutamakan kepentingan bangsa terhadap pertahanan.
3. Diciptakannya supremasi hukum dan konsistensi pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada.
4. Peningkatan kapabilitas komponen-komponen pertahanan terutama TNI dalam tiap aspek, baik anggaran militer, fasilitas dan prasarana, kesejahteraan prajurit, dan mengoptimalkan upaya-upaya untuk membangun militer Indonesia sebagai kekuatan sentral di Asia Tenggara sehingga pemerintah mempunyai kekuatan bargaining yang kuat terhadap negara manapun dan juga menjadi patron di kawasan.
5. Ketegasan dalam mensikapi kebijakan luar negeri negara lain yang dipersepsikan dapat menjadi ancaman.

---

<sup>10</sup> AS. Hikam, [www.detik.com](http://www.detik.com), 14 Juli 2006

## **Kesimpulan**

Indonesia merupakan negara yang besar di kawasan Asia Tenggara maupun dunia. Sebagai negara yang besar, Indonesia seharusnya mampu dan memiliki peranan yang cukup tinggi di kawasan dalam bidang apapun. Indonesia seharusnya menjadi patron dalam penentuan kebijakan kawasan secara umum.

Singapura merupakan negara pulau yang memiliki kemampuan militer dan ekonomi yang besar dan memiliki peranan dalam politik kawasan. Kebijakan-kebijakan luar negerinya yang didasarkan atas National Security, National Building, dan Economy Survival seringkali menjadi ancaman terhadap negara-negara tetangganya sehingga dianggap arogan. Singapura selalu merasa terancam dengan SDA yang minim dan luas wilayahnya yang kecil sehingga melakukan kebijakan apapun untuk menciptakan stabilitas domestik dan kawasan, survivality, dan national security. Pembangunan militer yang ditandai dengan besarnya anggaran militer menandakan bahwa setiap negara akan memaksimalkan kekuatan militernya untuk mencapai kepentingan nasionalnya sesuai dengan asumsi Realisme. Ketakutan Singapura juga merupakan cerminan Realisme terhadap asumsinya yang mengatakan bahwa sistem internasional bersifat anarki dan tidak ada satu otoritas yang mampu menjamin perdamaian dunia.

Hubungan Indonesia dan Singapura yang selama ini cukup baik seharusnya tidak melemahkan Indonesia dalam bersikap tegas terhadap kebijakan luar negeri Singapura yang dipersepsikan dapat menjadi ancaman. Hubungan kerjasama merupakan suatu hal yang normatif, tetapi kewaspadaan terhadap keamanan nasional dan kepentingan nasional harus diutamakan demi Indonesia. Kepentingan Singapura yang merupakan perwujudan dari Realisme harus dihadapkan dengan paradigma Keamanan Nasional yang melibatkan kekuatan diplomasi dan, penguatan dan pembangunan militer sebagai *back up* kekuatan diplomasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Snyder, Craig A. (Editor), Contemporary Security and Strategy, London, McMillan Press Ltd., 1999.

Suryana, Agus, PROFIL NEGARA: Negara Macan Asia, NAFTA&Uni Eropa, Jakarta, Harapan Baru Raya, 2005.

Widjajanto, Andi, dkk, *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*, Jakarta, IMPARSIAL, 2005.

### **Skripsi**

Damayanti, Dwidya Lestari, *Menguatnya Klaim Cina Atas Kepulauan Spratly Pasca Deng Xiaoping*, UPN "Veteran" Yogyakarta, 2005.

### **Majalah**

Majalah Angkasa no. 11, Agustus 2004 tahun XIV.

Majalah Tempo no.16/XXXIV/13-19 Juni 2005.

Majalah Gatra, 8 April 2006.

### **Situs**

<http://www.kompas.com>

<http://www.tempointeraktif.com>

<http://www.hariansib.com>

<http://www.dpr.go.id>

<http://www.pikiran-rakyat.com>

<http://www.wartadephan-online.com>

<http://www.mediaindo.co.id>

<http://www.bppt.go.id>

<http://www.hidayatullah.com>

<http://www.freelist.org/archives>

[http://id.wikipedia.org/wiki/selat\\_malaka](http://id.wikipedia.org/wiki/selat_malaka)

<http://kolom.pacific.net.id/ind/soedradjad...>

<http://www.gatra.com>

<http://www.sinarharapan.co.id>

<http://www.einnews.com/singapore/newsfeed>

<http://www.waspada.co.id>

Semua bahan dari internet diakses pada bulan Juli 2006.